

Evaluasi Program Bersama Lindungi Anak (BERLIAN) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo

Afiza Augustika Wardani¹, Dinda Alfianingrum², Adimas Anugraha Dzaki³, Fahmi Yahya Firmansyah⁴, Indira Arundinasari⁵

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak

The purpose of the study was to see how the Joint Program to Protect Children (Berlian) run by the Sidoarjo District Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning. The study method used is the CIPP model evaluation research method which includes context, input, process and product. Interviews, observations and written notes were some of the ways primary and secondary data sources were used to gather information, knowledge and data on how the Joint Program to Protect Children (Berlian) was used. The data came from policy reviewers in Sidoarjo district who work in family planning, child safety and women's empowerment services. The data also came from teachers at SMPN 1 Wonoayu and SMPN 1 Krembung. Context, input, process and product variables are the four categories on which the research findings are based. The research findings show that while the assessment of input variables is considered highly effective, the assessment of context variables is broadly considered ineffective, the assessment of process variables still requires work, and the assessment of product variables is considered effective.

Kata Kunci : Policy Evaluation, Child Abuse, BERLIAN Program

PENDAHULUAN

Di Indonesia, tidak ada lagi kekurangan kejahatan. Kejahatan merupakan masalah besar yang sulit dicegah dan terjadi di banyak negara, baik negara maju maupun berkembang. Kejahatan diartikan sebagai segala perilaku yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat karena melanggar hukum dan norma sosial, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan psikologis (Kosmaryati dkk. 2019).

Tingkat kejahatan di Indonesia sebagai sebuah negara berkembang, tergolong moderat. Kejahatan tidak diragukan lagi, yang merupakan salah satu permasalahan utama di Indonesia, meskipun tingkat kejahatan di negara ini berada di tengah-tengah global. Kriminalitas akan berdampak pada kehidupan bermasyarakat, perekonomian, dan pembangunan negara. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan berbagai upaya yang serius dari pihak

*) Corresponding Author

Email : 21041010250@student.upnjatim.ac.id

yang berwenang untuk mencegah dan mengatasi tindak kriminalitas.

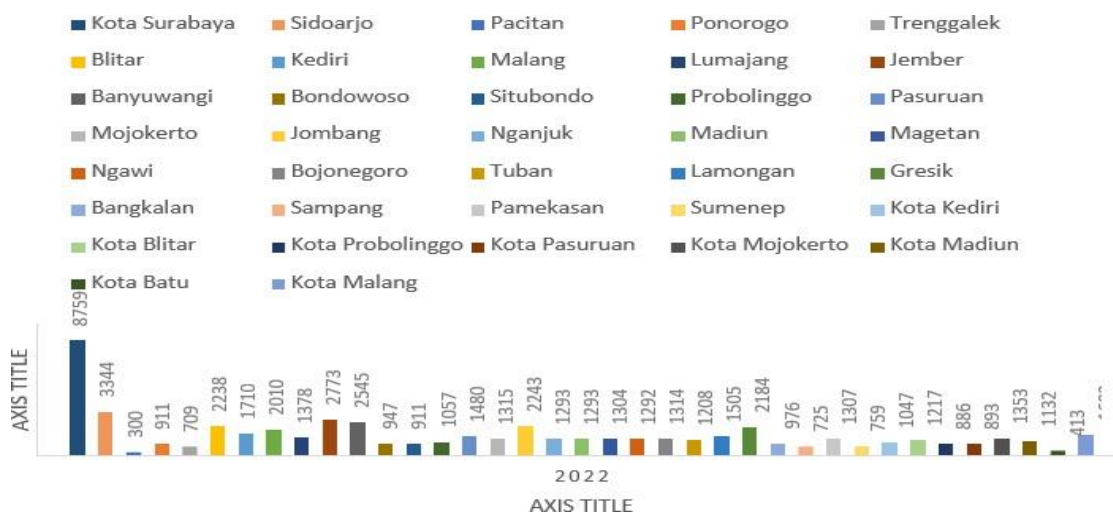
Berdasarkan informasi yang disampaikan Badan Pusat Statistik, terdapat 239.481 kejadian kriminalitas di Indonesia pada tahun 2021 dibandingkan dengan 247.218 kejadian pada tahun 2020. Namun, jumlah kejadian kriminal meningkat drastis pada tahun 2022 hingga mencapai 372.965 kejadian (BPS, 2023). Di Indonesia, permasalahan kejahatan menjadi semakin kompleks; beberapa konteks masyarakat dapat berdampak pada keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan. Menurut Rohman (2016), ada dua hal yang berkontribusi terhadap kejahatan: penyebab eksternal dan variabel internal, yang terdiri dari ciri-ciri umum dan khusus yang dimiliki seseorang. Berbeda dengan kualitas umum seperti usia, kekuatan fisik, kedudukan sosial, pendidikan, dan waktu luang, ciri-ciri khusus pada individu meliputi penyakit mental, kekuatan emosional, inferioritas mental, dan anatomi. Beberapa contoh penyebab eksternal adalah yang berkaitan dengan perekonomian (fluktuasi harga, pengangguran, urbanisasi), agama, dan sastra.

Kejahatan lebih mungkin terjadi di kota besar karena lingkungannya yang sibuk, padat, dan beragamnya aktivitas. Adapun tindak kejahatan yang bersumber dari data administrasi kepolisian dapat disajikan menurut Kepolisian Daerah (Polda) sesuai dengan wilayah yurisdiksinya masing-masing. Berdasarkan statistik kriminal (2023) yang bersumber dari (BPS, 2023) jumlah kejahatan yang dilaporkan

Polda Jawa Timur menjadi jumlah kejahatan terbanyak di tahun 2022 (51.905 kejadian), disusul oleh Polda Sumatera Utara sebanyak 43.55 kejadian, dan Polda Metro Jaya sebanyak 32.534 kejadian. Sementara itu, tiga Polda dengan tindak pidana paling sedikit adalah Provinsi Maluku Utara (1.220 kejadian), Kalimantan Utara (1.280 kejadian), dan Sulawesi Barat (2.027 kejadian). Namun demikian, mengingat adanya dugaan adanya kasus pidana yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang, tidak dapat disangkal bahwa data administratif tidak cukup mencerminkan seluruh kejadian kejahatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan kriminal, khususnya di daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi.

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki tingkat kejahatan tertinggi, meski bukan berarti daerah tanpa hukum. Berdasarkan informasi dari Kepolisian Daerah (Polda), Jawa Timur mengalami 51.905 tindak pidana pada tahun 2022. Di Provinsi Jawa Timur terjadi peningkatan kejahatan yang cukup signifikan sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari banyak orang. Banyaknya kriminalitas di Jawa Timur ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi tindak kriminal seperti jumlah penduduk miskin, pengangguran meningkat, dan kepadatan penduduk yang meningkat (Callista, 2022).

Grafik 1.1
Kriminalitas – Jumlah yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resort di
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2022



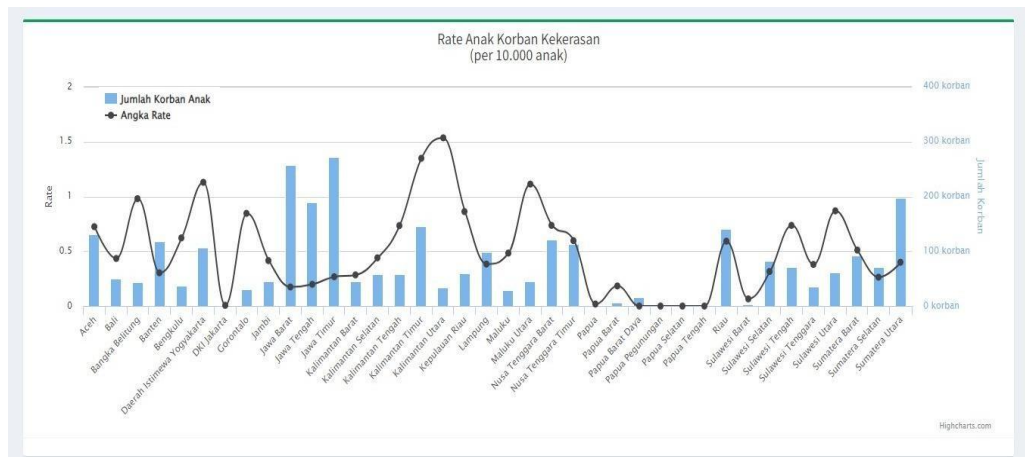
Sumber : BPS Jatim 2023

Provinsi Jawa Timur sendiri dalam tindak kriminalitas yang dilaporkan mengalami naik turun setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2019-2022 peningkatan jumlah kriminalitas di Provinsi Jawa Timur terbanyak dan Kota Surabaya menjadi kota terbanyak dengan tindak kriminalitas yang terjadi di tahun 2022 sebanyak 8.759 kasus kriminalitas, kemudian Kabupaten Sidoarjo berada di peringkat kedua dengan jumlah kriminalitas di tahun 2022 sebanyak 3.344 kejadian. Penyebab naik turunnya tindak kriminalitas di Jawa Timur ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang terjadi selama tahun

2019-2022 yang menyebabkan kondisi ekonomi penduduk di Indonesia yang juga ikut menurun sehingga menyebabkan bertambahnya masyarakat miskin dan pengangguran yang menjadi faktor peningkatan kriminalitas di Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur, kejahatan terhadap hak dan harta benda tanpa kekerasan berjumlah 6.929 dari total jumlah kejadian, sedangkan kejahatan terhadap nyawa hanya berjumlah 65 dari total kejadian. Salah satu kejahatan terhadap fisik yang juga terjadi di Jawa Timur yaitu adanya kasus kekerasan (Artari, 2021).

Grafik 1.2

Jumlah Kasus Korban Kekerasan Pada Anak Tahun 2024



Sumber : Simfoni PPA (2024)

Kasus kekerasan di Provinsi Jawa Timur tertinggi berdasarkan periode data kasus di tahun 2024 sebanyak 272 korban. Selain itu, berdasarkan BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2022 jumlah kekerasan dalam rumah tangga terdapat 1577 kasus serta adanya tindak perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 44.464 kasus. Dari adanya kasus kekerasan yang terjadi, perempuan dan anak yang sering menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual dan laki-laki sebagai pelaku kekerasan. Kasus kekerasan juga sering terjadi pada usia 13-17 tahun yang terkadang pelaku dan korban merupakan temannya sendiri yang berada di lingkungan pendidikan (SIMFONI PPA, 2024). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya

menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan pelaku dan korban kekerasan dalam lingkungan yang tidak seimbang menjadi penyebab maraknya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak adanya kesadaran pelaku yang tidak menyadari tindakan kekerasan yang dilakukan dapat menyakiti fisik dan merugikan korban, serta disebabkan juga karena penggunaan media sosial pada anak-anak secara tidak sehat yang dapat memicu terjadinya kekerasan.

Kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan di Sidoarjo juga perlu diperhatikan. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menyampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

kejahatan kekerasan di Sidoarjo tiga kali lebih banyak dibandingkan di Kota Surabaya dan Kabupaten Jember. Angka kekerasan pada anak di Sidoarjo selama 2023 masih tergolong tinggi yang tercatat mencapai ratusan anak yang menjadi korban kekerasan. Banyak jenis kekerasan yang dialami seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan, pencabulan, dan bullying.

Tabel 1.1
Korban Kasus Kekerasan Anak

TAHUN	JUMLAH
2019	46
2020	75
2021	91
2022	92
Jan-Juli 2023	74
Jan-Apr 2024	68

Sumber : UPTD PPA Sidoarjo

Dari jumlah kasus kekerasan pada di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 446 kasus terjadi selama tahun 2024 per bulan April. Kekerasan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 92 kasus di Kabupaten Sidoarjo. Dua laporan kasus penting yang diterima oleh UPTD PPA pada tahun 2024: satu kasus terkait penganiayaan anak yang dilakukan oleh ayah kandung hingga anak tersebut lahir, dan satu lagi adalah pencabulan yang dilakukan ayah terhadap balita berusia 3,5 tahun. Orang-orang terdekat korban seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, bahkan kakek lebih besar

kemungkinannya melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Hal ini disebabkan karena tidak harmonisnya lingkungan keluarga yang menjadi faktor utama. Selain itu, kasus kekerasan pada remaja SMP/SMA yaitu tindakan bullying yang dapat melukai fisik dan psikis seseorang yang dilakukan dalam lingkungan sekolah seperti dari kalangan remaja SMP/SMA mereka yang berusia 11-17 tahun yang pelaku kekerasannya pada temannya sendiri. Faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan yakni pada lingkungan yang salah, menggunakan gadget yang berlebihan pada anak, serta kurang kepedulian dari keluarga yang memicu terjadinya masalah yang dirasakan anak sebagai korban kekerasan.

Tabel 1.2
Data Korban Berdasarkan Jenis Kasus

KATEGORI KASUS	BULAN				TOTAL
	Jan	Feb	Mar	Apr	
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	5	9	2	6	22
Kekerasan Terhadap Anak	1		2	1	4
Kekerasan Dalam Kerja					
Kekerasan Dalam Pacaran		1			1
Kekerasan Ekonomi	3				3
Pelecehan Seksual	1	2			3
Pencabulan	3	7	6	1	17
Pemeriksaan	1				1
Trafficking					
Penganiayaan					
Perebutan Hak Asuh Anak	3	1	2		6
Bullying					
Kekerasan Berbasis Gender Online					
Pemenuhan Hak Anak	3	1	4	3	11
Lain-Lain					
JUMLAH	20	21	16	11	68

Sumber : UPTD PPA Sidoarjo

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan merupakan representasi nyata upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Aturan tersebut mengatur bahwa lembaga pemerintah atau non-pemerintah dapat menyediakan dan melaksanakan layanan terpadu, seperti kemandirian medis, medikolegal, psikososial, hukum, dan ekonomi, bagi korban kekerasan. Untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebelum terjadi, pemerintah memiliki program seperti UPTD PPA yang membantu korban kekerasan mendapatkan perawatan medis. Program ini bekerja sama dengan RSUD Kabupaten Sidoarjo. Untuk membantu menurunkan angka kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo, dibentuklah kelompok bernama Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat desa. Kemudian, kepala desa, babinsa, dan bhabinkamtibmas bisa bersama-sama membentuk gugus tugas PPA desa. Pihak kecamatan juga membentuk Satgas PPA kecamatan yang terdiri dari Koramil dan Polisi Sektor di wilayahnya. Menjalin hubungan dengan organisasi yang memberikan layanan dukungan yang baik dan berbiaya rendah, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau LSM yang menangani perlindungan atau kekerasan anak, Puskesmas, Kepolisian Sektor,

Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Babinsa, dan lembaga sosial di masyarakat, merupakan salah satu cara untuk menghentikan kekerasan terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo kemudian menjangkau instansi sekolah untuk membuat Program Bersama Lindungi Anak. Program ini memberikan lebih banyak informasi kepada guru dan siswa tentang cara menghentikan kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, dan penggunaan teknologi yang aman. Selain itu, program ini bekerja sama dengan Satuan Reserse Kriminal PPA Polresta Sidoarjo.

Program Bersama Lindungi Anak yang juga disebut dengan Berlian, merupakan salah satu inisiatif yang dimulai untuk mengatasi insiden kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu inisiatif yang dilakukan DP3AKB Kabupaten Sidoarjo untuk menghentikan kekerasan terhadap anak adalah Program Berlian. Program Berlian berpusat pada inisiatif pencegahan kekerasan di sekolah. DP3AKB Kabupaten Sidoarjo tengah menggalakkan kampanye Berlian pada jenjang pendidikan TK hingga SMA di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka memaksimalkan Program Berlian. Konseling Program Berlian membantu guru dan siswa belajar lebih banyak tentang kebiasaan penggunaan internet yang baik, cara menghentikan perundungan dan pelecehan seksual

terhadap anak, serta cara menghentikan kekerasan terhadap mereka. Pendanaan pelaksanaan Program Berlian ini bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo atau sumber lain yang dapat diterima dan tidak mengikat, serta bekerja sama dengan organisasi terkait di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam Program Berlian, yang dilaksanakan dengan datang langsung ke sekolah, anak-anak sering kali melaporkan pengalaman kekerasan yang mereka alami kepada guru bimbingan dan konseling setelah acara penjangkauan. Dalam hal ini, penyuluh akan membuat konten yang sesuai dengan keadaan anak, sehingga mudah dipahami dan menarik untuk didengarkan. Selain itu, juga akan diketahui permasalahan apa saja yang sering muncul di lingkungan remaja usia sekolah. Anak yang mendapat konseling tidak hanya menumbuhkan kesadaran akan pencegahan sebagai cara mencegah kekerasan, namun juga menumbuhkan keberanian untuk melaporkan kejadian kekerasan (Bastian, 2024).

Meskipun demikian, ada juga permasalahan yang mempersulit penerapan pendekatan Berlian, seperti kurangnya pendidikan masyarakat, meningkatnya kenakalan remaja, kurangnya transparansi keluarga dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak, dan kurangnya kesadaran di kalangan siswa tentang hal ini. Risiko yang terkait dengan kekerasan. Tidak

hanya itu, terdapat pula hambatan lain dalam memaksimalkan efektivitas Program Berlian. Hal ini mencakup persepsi bahwa kekerasan adalah urusan pribadi yang tidak boleh dibicarakan, ketakutan akan penolakan ketika melaporkan isu kekerasan, dan kurangnya tenaga pendidik yang sadar akan isu kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan apa yang mereka dengar mengenai permasalahan tersebut, peneliti ingin melihat Program Bersama Lindungi Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari upaya menghentikan kekerasan pada anak. Apakah program Berlian berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya pengentasan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian bertajuk "Evaluasi Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KB di Kabupaten Sidoarjo" Ini menggunakan metode kualitas. Seperti yang dikatakan Daniel Stufflebeam (1966), tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi Program Berlian dengan menggunakan empat variabel evaluasi: konteks, masukan, proses, dan hasil. Penelitian berlangsung di Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Untuk penelitian ini, observasi, wawancara, dan penulisan digunakan untuk mengumpulkan data utama dan data sekunder.

Informan dalam penelitian ini adalah Ritz Noor Widiyastutik Antarlina, S.Sos selaku Analis kebijakan perlindungan perempuan dan anak DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, Anin Naim sebagai Waka Humas SMP Negeri 1 Wonoayu, dan Mokhammad Maksam, S.Pd sebagai Kesiswaan SMP Negeri 1 Krembung. Proses pemilihan informan melibatkan penggunaan purposive sampling, yang memungkinkan peneliti memilih subjek yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang topik dan isu serta merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya. Observasi langsung terhadap objek penelitian untuk menggali informasi terkait permasalahan penelitian ini, wawancara berupa percakapan terkait program Berlian, dan dokumentasi berupa catatan dan dokumen terkait Program Berlian di Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data. digunakan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian, data dari wawancara, catatan lapangan, makalah, dan sumber lain dibersihkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kenyataan. Analisis data model Miles dan Huberman digunakan oleh peneliti untuk

mengumpulkan data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan (Rahayuningsih et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan membahas tentang Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo serta memaparkan hasil penelitian pada bagian ini. Temuan dari penyelidikan ini sejalan dengan maksud dan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengevaluasi Program Perlindungan Anak Bersama untuk membantu menghentikan kekerasan terhadap anak. Fokus kajian menurut Stufflebeam yang mengembangkan Teori CIPP yaitu konteks, input, proses, dan produk, dikonsultasikan oleh peneliti guna menentukan apa saja yang perlu dikaji dalam Program Berlian dalam upaya pengurangan kekerasan anak oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo.

Context

Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat Sidoarjo memperoleh jumlah tertinggi ketiga dari Provinsi Jawa Timur terkait kasus kekerasan setelah Kota Surabaya dan Kabupaten

Jember. Angka kekerasan pada anak di Sidoarjo selama 2023 masih tergolong tinggi yang tercatat mencapai ratusan anak yang menjadi korban kekerasan. Banyak jenis kekerasan yang dialami seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan dalam pacaran, kekerasan berbasis gender online, kekerasan ekonomi, pelecehan, pencabulan, bullying, dan penganiayaan. Inisiatif Bersama Lindungi Anak di Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk melindungi dan melayani anak demi kepentingan terbaik masyarakat dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak di ruang publik, khususnya sekolah. Terpeliharanya persamaan hak dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan dan keadilan gender, serta terpeliharanya hak asasi perempuan dan anak merupakan salah satu pencapaian Program Berlian. Tanpa bantuan organisasi terkait, lembaga pendidikan, dan masyarakat, tujuan tersebut akan sulit tercapai. Banyak undang-undang yang dibuat pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), dan undang-undang lain yang sejalan dengan hal tersebut.

Sebagai upaya mengatasi tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mencanangkan Program Berlian. Program ini menggunakan metode perlindungan anak yang terintegrasi dan berbasis komunitas. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo kemudian mulai menggunakan metode tersebut. Program Berlian didasarkan pada dua peraturan yaitu Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan tersebut mengatur bagaimana pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat bekerja sama untuk menyediakan dan melaksanakan layanan terpadu bagi korban kekerasan. Pemerintahan, meliputi kemandirian di bidang kesehatan, hukum, psikoterapi, dan kedokteran. Dalam rangka melaksanakan program tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan organisasi dan lembaga pendidikan terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ritz Noor yang menjabat sebagai Analis Kebijakan pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo Program Berlian ini diawali dengan survey kasus kenakalan remaja pada tiap sekolah di Kabupaten Sidoarjo, membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) , membuat surat untuk sekolah dan narasumber yang akan dituju, pembuatan jadwal kegiatan, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan program Berlian pada waktu yang telah ditentukan dengan menggandeng instansi lain yang relevan dengan permasalahan yang ada pada sekolah yang akan di sosialisasi. Dengan demikian pada evaluasi konteks ini sudah dapat dikatakan efektif, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan narasumber dari SMP 1 Wonoayu yaitu bapak Anin Naim selaku Waka Humas dan Bapak M. Maksu selaku Kesiswaan dari SMP 1 Krembung, beliau mengatakan bahwa program Berlian ini efektif karena membuat anak yang menjadi korban pelecehan, kekerasan, maupun bullying berani untuk melapor kepada pihak yang berwenang di lingkungan sekolah, seperti wali kelas atau guru BK.

Input

Sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan suatu program, termasuk keuangan, staf, dan fasilitas, disebut input. Temuan studi ini menunjukkan bahwa terdapat cukup sumber daya manusia yang tersedia

untuk melaksanakan inisiatif berlian. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan kelompok lain untuk menjadi narasumber dalam mewujudkan program berlian. Banyak organisasi yang bekerja di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Beberapa diantaranya adalah Sekolah Kabupaten Sidoarjo, Masyarakat, Kepolisian, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, RSUD Sidoarjo, dan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. dari lembaga-lembaga ini. *Stakeholder* ini bekerja sama agar korban kekerasan mendapatkan pelayanan medis, psikologis, dan hukum. Pemilihan narasumber pada pelaksanaan program Berlian ini berdasarkan kasus yang ada pada sekolah yang akan di sosialisasi, sehingga proses pelaksanaan sosialisasi program Berlian ini akan relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah tersebut. Sarana dan Prasarana atau fasilitas sudah tersedia sesuai kebutuhan seperti makanan (snack) atau minuman, banner, beberapa hadiah untuk mengapresiasi para siswa, dan keperluan lainnya. DP3AKB Sidoarjo juga memfasilitasi layanan pengaduan bagi korban kekerasan secara *offline* maupun *online*. Ada 3 jenis pengaduan dalam proses penanganan kasus kekerasan ini yaitu pengaduan langsung, pengaduan

tidak langsung, dan pengaduan media. Pengaduan langsung dilakukan dengan cara korban mendatangi langsung kantor DP3AKB Sidoarjo atau mendatangi Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap desa dan kecamatan, sedangkan pengaduan tidak langsung dilakukan melalui media sosial DP3AKB Sidoarjo, dan pengaduan media ditangani dengan cara "Penjangkauan" melalui desa apabila ada kasus kekerasan anak yang tidak diketahui DP3AKB Sidoarjo namun kasus tersebut sudah viral di media sosial. Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) di instansi sekolah, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di tiap desa dan kelurahan, serta penerapan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa dan kelurahan merupakan jalur tambahan pengaduan. Setelah adanya proses pengaduan korban akan diterima oleh konselor, diberi format untuk konsultasi, dan jika diperlukan korban akan diberi penanganan oleh tenaga ahli seperti psikolog, psikiater, dan lain sebagainya. Program Berlian ini sudah berjalan selama hampir 10 tahun, namun pelaksanaannya masih belum merata. Masih ada beberapa sekolah yang belum menerima sosialisasi program Berlian ini. Menurut Ibu Ritz Noor selaku Analis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo, beliau mengatakan penyebab belum

meratanya pelaksanaan program tersebut, karena kurangnya anggaran pada program tersebut dan banyaknya jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Anggaran Program Berlian didapatkan dari APBD, Dana Pokir DPRD Sidoarjo, Dana Alokasi Khusus KEMENPPPA, dan Kerjasama dengan Organisasi *Independen* seperti *Save The Children*. Dana ini dapat dianggarkan semaksimal mungkin untuk kebutuhan DP3AKB Sidoarjo khususnya pada Program Berlian, namun tetap dalam pengawasan pengurus anggaran. Dana yang didapatkan berkisar senilai Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan dapat berubah setiap tahunnya. Kendala pada dana yang sempat dialami DP3AKB Sidoarjo disebabkan oleh adanya wabah *corona virus* dan adanya kepentingan politik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dan fasilitas dalam pelaksanaan program Berlian sudah dapat dikatakan cukup. Namun, perlu adanya evaluasi kembali mengenai anggaran yang masih kurang maksimal.

Process

Evaluasi *process* merupakan pelaksanaan dari Program Bersama Lindungi Anak (Berlian). Tujuan adanya evaluasi *process* ini yaitu untuk membantu dalam melaksanakan keputusan, menilai, serta memantau pelaksanaan dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan sehingga dapat pelaksana

dalam menjalankan kegiatan. Program Berlian ini terbit sejak tahun 2014 dan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi Berlian selama 8 tahun. Pelaksanaan Program Berlian dilaksanakan mulai dengan pembentukan tim dan pendamping Program Berlian, penyediaan sarana dan prasarana Program Berlian, dan sosialisasi Program Berlian kepada siswa-siswi dari TK hingga SMA di Kabupaten Sidoarjo.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo telah membuat MOU dengan seluruh sekolah di kabupaten tersebut, mulai dari TK hingga SMA. Ini adalah hal pertama yang mereka lakukan sebelum berangkat ke sekolah untuk melakukan program sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ritz Noor sebagai analis kebijakan DP3AKB Sidoarjo, bahwa tujuan dari perjanjian MOU tersebut dapat mengikat kerjasamanya antara DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo sehingga adanya kegiatan sosialisasi Berlian ini dapat menanggulangi dan mencegah kasus kekerasan pada anak. Dengan demikian, menunjukkan bahwa DP3AKB Kabupaten Sidoarjo berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait Program Berlian ini yang akan berkeliling-keliling ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi. Dalam proses sebelum dilakukannya kegiatan sosialisasi

Berlian, pertama-tama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo berkunjung ke sekolah terlebih untuk melakukan survey kasus yang ada di sekolah yang akan dituju serta berkoordinasi dengan kepala sekolah dan Guru BK mengenai kasus kenakalan dan kekerasan pada anak. Kemudian DP3AKB Kabupaten Sidoarjo membuat kerangka acuan kegiatan sosialisasi Program Berlian, setelah itu membuat surat kepada lembaga sekolahan yang dituju dan surat untuk narasumber yang akan menyampaikan sosialisasi. Proses terakhir yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo sebelum dilakukan kegiatan sosialisasi Berlian yaitu membuat jadwal kegiatan sosialisasi Program Berlian.

Kemudian dalam kegiatan sosialisasi Berlian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo juga bekerjasama dengan instansi lainnya dalam mengisi kegiatan sosialisasi Berlian. Seperti yang dikatakan oleh narasumber dari DP3AKB Kabupaten Sidoarjo oleh Ibu Ritz Noor sebagai analis kebijakan, bahwa program sosialisasi Berlian yang telah dilaksanakan pada salah satu sekolah di Kabupaten Sidoarjo dengan kasus di lingkungan sekitarnya yang sering ditemukan adanya kasus narkoba, maka DP3AKB Kabupaten Sidoarjo

mengajak instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sidoarjo untuk ikut mengisi terkait pencegahan narkoba. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo juga pernah mengajak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan sosialisasi Berlian di salah satu sekolah di Kabupaten Sidoarjo, karena sekolah tersebut siswa-siswinya kecanduan dengan penggunaan HP. Program sosialisasi Berlian ini dapat berjalan dengan mendapatkan anggaran dari APBD, Dana Pokir DPR, dan DAK KEMENPPA. Anggaran tersebut digunakan untuk keperluan sarana dan prasarana selama kegiatan sosialisasi Berlian berlangsung, seperti siswa-siswi yang hadir dalam sosialisasi diberikan makanan dan minuman serta memberikan hadiah-hadiah sebagai identitas bahwa anak akan selalu dilindungi.

Sosialisasi Program Berlian yang disampaikan pada siswa-siswi sekolah di Kabupaten Sidoarjo ini juga memberikan arahan jika terjadi kasus kekerasan pada anak sehingga mempermudah DP3AKB Sidoarjo untuk menerima laporan dan mempermudah untuk segera menanggulangi kasus kekerasan pada anak. Dalam proses pertama pada laporan kekerasan pada anak yaitu korban ataupun pelapor harus mendatangi layanan pengaduan atau pada UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dan laporan kekerasan anak akan

diterima oleh konselor. Kemudian korban ataupun pelapor kekerasan anak diberi format oleh konselor yang akan dikonsultasikan dan selanjutnya diberi penanganan seperti oleh psikologi dan tenaga ahli lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ritz Noor sebagai analis kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dalam proses penanganan kasus kekerasan anak, bahwa orang tua juga harus ikut mendampingi anaknya karena selain anak yang diinterogasi, namun orang tua juga perlu diinterogasi oleh konselor. Jika korban memiliki trauma yang berat maka didatangkan psikolog dengan memberikan penyembuhan dasar atas traumanya. Kemudian jika trauma korban lebih berat lagi, maka UPTD PPA akan mendatangkan tenaga ahli lainnya dan memantau selama tiga bulan.

Evaluasi proses pada Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) ini sudah efektif dalam implementasinya. Pelaksanaan programnya yang sudah dipersiapkan dalam menangani kasus kekerasan anak dengan pemberian sosialisasi ke sekolah-sekolah dan mengajak instansi-instansi terkait dalam pemberian sosialisasi Berlian. Keberadaan Program Berlian ini menunjukkan upaya luar biasa yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dalam melindungi dan mencegah kasus kekerasan terhadap

anak di Sidoarjo. Namun demikian, ketika peneliti mendistribusikan program Berlian ke sekolah-sekolah, mereka menemukan adanya variasi dalam cara pelaksanaannya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Terdapat variasi dalam pelaksanaan program Berlian di SMP Negeri 1 Wonoayu dan SMP Negeri 1 Krembung, berdasarkan temuan penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara dengan masing-masing informan. Pihak DP3AKB menyatakan bahwa sebelum melakukan sosialisasi Berlian akan melakukan survey kenakalan yang terjadi pada sekolah yang akan dituju, namun dari hasil wawancara dari masing-masing informan di SMP Negeri 1 Wonoayu dan SMP Negeri 1 Krembung menyatakan bahwa DP3AKB Sidoarjo langsung bekerjasama dengan pihak sekolah bahwa akan melakukan kegiatan sosialisasi pada sekolah tersebut dan tidak melakukan survey terlebih dahulu mengenai kasus kenakalan remaja yang dapat menyebabkan kekerasan dari SMP Negeri 1 Wonoayu dan SMP Negeri 1 Krembung. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo tetap melaksanakan program sosialisasi Berlian secara merata di sekolah-sekolah se-Kabupaten Sidoarjo, meskipun sekolah tersebut tidak ditemukan

kasus kekerasan maupun kenakalan terhadap anak.

Product

Pencapaian hasil program berfungsi sebagai kerangka untuk mengevaluasi product. Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) yang pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu contoh program yang dianggap berhasil jika berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mengukur tingkat perkembangan Program Berlian di Kabupaten Sidoarjo dan memenuhi tujuan program yang telah ditetapkan, diperlukan pula penilaian produk. Tujuan dibentuknya Program Berlian oleh DP3AKB Sidoarjo adalah untuk memberikan layanan dan perlindungan bagi perempuan dari kekerasan berbasis gender yang terjadi di depan umum atau di rumah dan melindungi kepentingan terbaik anak. Sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak merupakan komponen produk program Berlian di Kabupaten Sidoarjo dan dilaksanakan di seluruh sekolah di wilayah tersebut, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Dalam pelaksanaan sosialisasi Berlian, dinas dan instansi terkait menjelaskan mengenai kenakalan dan kekerasan yang terjadi pada anak dengan memberi pencegahan dan arahan

agar terhindar dari kasus tersebut. Program sosialisasi ini dilakukan berfokus pada anak yang bisa saja menjadi pelaku kekerasan atau korban terhadap kekerasan sehingga program ini sudah efektif jika dilakukan di sekolah-sekolah.

Hasil pelaksanaan program Berlian ini berupa respon positif dari pihak sekolah yang telah diberikan sosialisasi program Berlian yaitu dari SMP Negeri 1 Wonoayu dan SMP Negeri 1 Krembung. Hal ini dapat dinyatakan dari hasil wawancara dengan informan dari masing-masing sekolah, bahwa pelaksanaan program Berlian telah efektif untuk membantu mencegah kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, meskipun masih ada beberapa siswa yang masih saling mengejek dan berkata yang kurang sopan di lingkungan sekolah. Selain itu, sosialisasi program Berlian ini mendapat respon yang positif juga dari para siswa untuk mengikuti sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari instansi terkait ataupun dari kepolisian. Selama kegiatan sosialisasi Berlian berlangsung, DP3AKB sebagai narasumber berusaha memberikan materi secara menyenangkan dan mudah dipahami agar para siswa menjadi tidak jenuh selama kegiatan sosialisasi berlangsung. Hal ini dinyatakan dari hasil wawancara dengan Ibu Ritz Noor selaku analis kebijakan DP3AKB, bahwa selama kegiatan sosialisasi Berlian berlangsung para siswa semangat mengikuti dan juga menjadi interaktif

terkait sosialisasi yang diberikan. Dari program Bersama Lindungi Anak ini menyebabkan kasus kekerasan pada anak di Sidoarjo meningkat. Hal ini disebabkan karena dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut semakin banyak anak yang berani untuk melapor pada wali kelas, guru BK bahkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Dalam kegiatan sosialisasi Berlian, dinas dan instansi terkait memberikan arahan bagi anak yang mendapat perlakuan yang melecehkan fisik dan psikisnya agar dapat langsung melapor.

Karena banyaknya anak yang melaporkan kekerasan, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak membuat kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan tersebut mencakup layanan medis, psikologis, dan hukum. DP3AKB bekerja sama dengan RSUD Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada korban penganiayaan. Dalam hal pelayanan kesehatan diperlukan DP3AKB akan memberikannya secara cuma-cuma kepada setiap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan psikologis melibatkan pemberian dukungan dan dorongan kesehatan mental kepada korban pelecehan untuk meningkatkan kehidupan mereka dan membantu mereka melupakan hal-hal buruk yang terjadi pada mereka. Bantuan

layanan hukum dalam menangani kejahatan kekerasan dilaksanakan melalui upaya kolaboratif pengadilan dan polisi untuk menyelesaikan kasus sesuai dengan hukum. Langkah-langkah pencegahan juga telah dilakukan untuk mencoba menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebelum hal itu terjadi. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dibentuk di desa dan kelurahan, Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) dilaksanakan di sekolah-sekolah, dan dibentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap desa dan Kecamatan. Selain itu, Layanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana UPTD PPA Sidoarjo juga menawarkan layanan pengaduan yang berbeda, seperti laporan langsung, dimana korban atau pelapor langsung mendatangi kantor UPTD PPA. Pengaduan tidak langsung yang melalui media sosial DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dan terdapat layanan selama 24 jam melalui *Whatsapp* sehingga dengan adanya pelayanan ini dapat mempermudah masyarakat jika terjadi tindakan kekerasan terhadap anak. Pengaduan media yang didapatkan oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo mengenai terjadinya kasus kekerasan anak yang tersebar luas melalui media sosial sehingga UPTD PPA melakukan penjangkauan dengan mendatangi langsung pada tempat terjadinya

kasus kekerasan anak dan mencari tahu mengenai kasus tersebut.

Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan penghargaan predikat Kota Layak Anak selama 4 tahun, meskipun kasus kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ritz Noor selaku Analis Kebijakan DP3AKB mengatakan bahwa meningkatnya jumlah kasus kekerasan anak di Sidoarjo inilah yang menjadikan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan predikat Kota Layak Anak, karena menunjukkan bahwa pemerintah bekerja dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan pada sistem perlindungan anak yang berjalan. Upaya-upaya yang diberikan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam perlindungan anak yaitu adanya regulasi yang jelas, penetapan kebijakan, serta dalam implementasinya masyarakat juga dilibatkan dengan berkoordinasi dan bersinergi dalam upaya perlindungan kasus kekerasan pada anak. Berdasarkan data kasus korban kekerasan anak di tahun 2024 ini yang terhitung hingga bulan April berjumlah 68 yang mana jumlah ini menurun dari pada tahun 2023 yang terhitung hanya sampai bulan Juli yang berjumlah 74 lebih tinggi. Oleh karena itu, setelah dilakukan sosialisasi Program Berlian ini dapat menurunkan jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak.

Pada evaluasi *product* terhadap program Bersama Lindungi Anak di Kabupaten Sidoarjo dengan

menjalankan kegiatan sosialisasi di sekolah se-Kabupaten Sidoarjo ini sudah cukup berhasil, namun dalam pelaksanaan sosialisasi Berlian di sekolah-sekolah se-Kabupaten Sidoarjo masih belum merata. Berdasarkan temuan penelitian, sekolah menyambut baik program tersebut dan setuju untuk bekerja sama dengan DP3AKB Kabupaten Sidoarjo untuk memerangi dan mencegah kasus kekerasan terhadap anak. Hasilnya, Kabupaten Sidoarjo yang mendapat predikat Kota Layak Anak menunjukkan efektivitasnya dalam membela anak dari peristiwa kekerasan. Banyak upaya telah dilakukan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini mencakup Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap desa dan kelurahan, Program Bersama Perlindungan Anak (Berlian) di sekolah, pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa dan kelurahan, serta pembentukan Pemberdayaan Perempuan Dinas Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo juga memiliki layanan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan. Pelayanan pengaduan ini seperti pengaduan dilangsung ke kantor UPTD PPA, pengaduan tidak langsung melalui media sosial milik DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dan layanan pengaduan 24 jam melalui *Whatsapp*, serta pengaduan media

yang tersebarlynya kasus kekerasan di media sosial.

KESIMPULAN

Berikut hasil penelitian yang melihat bagaimana teori CIPP dapat digunakan untuk menilai Program Bersama Melindungi Anak (Berlian) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana di Kabupaten Sidoarjo dalam upaya menghentikan kekerasan pada anak :

1. Pada evaluasi *context* standar/ukuran, tujuan, dan regulasi kebijakan dalam Implementasi Program Bersama Lindungi Anak (Berlian) dalam Upaya Pencegahan di Kabupaten Sidoarjo diketahui secara jelas oleh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dan pengurus program Berlian. Perencanaan pada Program berlian ini diawali dengan survey kasus kenakalan remaja pada tiap sekolah di Kabupaten Sidoarjo, membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), membuat surat untuk sekolah dan narasumber yang akan dituju, pembuatan jadwal kegiatan, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan program Berlian pada waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan program Berlian juga dapat dikatakan efektif karena membuat anak yang menjadi korban pelecehan, kekerasan, maupun

- bullying berani untuk melapor kepada pihak yang berwenang.
2. Ketersediaan dan kecukupan sumber daya kebijakan dibahas di bagian evaluasi masukan. Apabila terdapat tenaga profesional di bidangnya yang mengawal Program Berlian, maka dapat dikatakan tersedia sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk pelaksanaannya di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, RSUD Sidoarjo, Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo, Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sidoarjo, Sekolah di Kabupaten Sidoarjo, Masyarakat, dan masih banyak lagi yang termasuk dalam hal ini. daftar sumber daya manusia, beserta seluruh pegawai DP3AKB Polres Sidoarjo. Mereka adalah individu-individu yang kompeten dengan kesiapan dan pengetahuan yang baik tentang Program Berlian. Kemampuan dan kompetensi mereka juga dinilai baik. Meski demikian, kepentingan politik dan anggaran yang kurang ideal akibat wabah virus corona masih menghambat proses implementasi.
 3. Untuk memastikan sosialisasi Program Berlian kepada siswa sekolah di Kabupaten Sidoarjo berjalan lancar, bagian evaluasi proses Program Bersama Lindungi

Anak sudah efektif dalam pelaksanaannya sejak awal. Termasuk melakukan koordinasi dengan lembaga pendidikan dan instansi terkait sebagai narasumber sosialisasi Program Berlian. Oke. Selain itu, untuk memastikan sosialisasi yang diberikan sesuai dengan kasus yang ada, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo terlebih dahulu melakukan survei kasus di sekolah-sekolah yang akan menjadi fokus. Dalam pemberian layanan pengaduan tersebut selanjutnya dapat dipermudah bagi pelapor atau korban untuk melaporkan sehingga dapat segera ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Meski belum ada laporan kekerasan atau kenakalan remaja terhadap anak, namun program sosialisasi Berlian tetap dilaksanakan secara merata di seluruh sekolah di Kabupaten Sidoarjo oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo.

4. Banyaknya kejadian kekerasan terhadap anak di Sidoarjo membuat kabupaten tersebut dinobatkan sebagai Kota Layak Anak dalam wilayah penilaian produk. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang menerapkan sejumlah langkah untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang ada saat

ini. Banyak upaya telah dilakukan untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini mencakup Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap desa dan kelurahan, Program Bersama Perlindungan Anak (Berlian) di sekolah, pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa dan kelurahan, serta pembentukan Pemberdayaan Perempuan Dinas Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, pengaduan media atas peristiwa kekerasan yang menjadi viral di media sosial dapat ditujukan ke kantor UPTD PPA, begitu pula pemberitaan tidak langsung yang dilakukan melalui akun media sosial DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dan layanan pengaduan Whatsapp 24 jam.

SARAN

Rekomendasi berikut disarankan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan:

1. Untuk memperoleh hasil yang lebih sukses, Departemen Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana harus melibatkan keluarga dan masyarakat dalam program sosialisasi saat melaksanakan Program berlian.
2. Melakukan monitoring secara berkelanjutan dan menyeluruh

dari sekolah-sekolah untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program Berlian.

3. Untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, perlu adanya koordinasi aktif antara Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di setiap desa dan kelurahan serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa dan kelurahan. Hal ini melibatkan penjangkauan, pemahaman, dan diskusi dengan masyarakat.
4. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk ketepatan penggunaan anggaran pada setiap kebutuhan guna evaluasi pada perencanaan anggaran berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa, W. F., Fattah, A., & Utami, M. A. P. (2022). Evaluasi Program Pendidikan Pesantren Mahasiswa Model Cipp (Context, Input, Process, Product). *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 75-86. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v6i1.848>
- Ardiyani, M. (2022). *Evaluasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Da'i Pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Artari, A. F. (2021). *Permodelan Tingkat Kriminalitas di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Analisis Regresi Generalized Poisson*. Universitas Negeri Jakarta.
- Bastian, M. A. (2024). *Implementasi Program Bersama Lindungi Anak Dalam Perlindungan Korban*

- Kekerasan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- BPS. (2023). Statistik Kriminal. *Badan Pusat Statistik, 021*, 5–6.
- Callista, J. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Kriminalitas Di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Analisis Jalur*. Universitas Negeri Padang.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Widya Karya Semarang.
- Kosmaryati, K., Handayani, C. A., Isfahani, R. N., & Widodo, E. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel. *Indonesian Journal of Applied Statistics, 2*(1), 10. <https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.27932>
- Mariyati, T. (2015). Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi, 11*(2), 147. <https://doi.org/10.17933/bpostel.2013.110205>
- Rahayuningsih, Y., Budiarto, S., & Isminingsih, S. (2019). Peran Bumdes Dalam Penguatan Ekonomi Desa Sukaratu Kabupaten Serang, Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 3*(2), 80–87. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i2.63>
- Rahmayanti, D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Di Kota Tangerang Selatan. In *Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Antariksa, W. F., Fattah, A., & Utami, M. A. P. (2022). Evaluasi Program Pendidikan Pesantren Mahasiswa Model Cipp (Context, Input, Process, Product). *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 6*(1), 75–86. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v6i1.848>
- Ardiyani, M. (2022). *Evaluasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Da'i Pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Artari, A. F. (2021). *Permodelan Tingkat Kriminalitas di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Analisis Regresi Generalized Poisson*. Universitas Negeri Jakarta.
- Bastian, M. A. (2024). *Implementasi Program Bersama Lindungi Anak Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- BPS. (2023). Statistik Kriminal. *Badan Pusat Statistik, 021*, 5–6.
- Callista, J. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Kriminalitas Di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Analisis Jalur*. Universitas Negeri Padang.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Widya Karya Semarang.
- Kosmaryati, K., Handayani, C. A., Isfahani, R. N., & Widodo, E. (2019). Faktor-Faktor yang

- Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia Tahun 2011-2016 dengan Regresi Data Panel. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 10. <https://doi.org/10.13057/ijas.v2i1.27932>
- Mariyati, T. (2015). Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 11(2), 147. <https://doi.org/10.17933/bpostel.2013.110205>
- Rahayuningsih, Y., Budiarto, S., & Isminingsih, S. (2019). Peran Bumdes Dalam Penguatan Ekonomi Desa Sukaratu Kabupaten Serang, Banten. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), 80–87. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v3i2.63>
- Rahmayanti, D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Di Kota Tangerang Selatan. In *Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rohman, A. (2016). Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat. *Perspektif*, 21(2), 125. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.187>
- Saputra, G. D. (2023). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Bangkinang Kota Kabupaten Kampar* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://doi.org/10.32487/jshp.v4i2.841>
- SIMFONI PPA. (2024). *Jumlah Kasus Kekerasan*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Taufiqurokhman, D. (2014). *Kebijakan Publik*. PT Buku Kita.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. PT Buku Kita.